

MODAL POLITIK KANDIDAT PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM Studi Kasus Dewi Noviany dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Joni Firmansyah¹, Shafira Faradhila²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia
joni.firmansyah@uts.ac.id

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia
shafirafaradhila08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modal-modal yang dimiliki oleh kandidat perempuan di dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Kehadiran Dewi Noviany sebagai salah satu pasangan calon di dalam pemilu tersebut, memberikan contoh bagaimana modal-modal yang dimiliki oleh kandidat tersebut dapat menunjang keterpilihannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui proses observasi, analisis dokumen, foto dan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber yang memiliki kepakaran di bidang tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewi Noviany memiliki beberapa modal yang diunggulkan. *Pertama*, dalam modal politik, ia didukung oleh mesin-mesin partai yang bekerja secara maksimal. Kemudian didukung oleh elit-elit lokal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan daerah yang tengah menjabat. Sementara itu, ia juga didukung oleh tim pemenangan yang sudah berpengalaman dalam proses pemenangan pemilu. *Kedua*, dalam modal sosial, ia mendapat kepercayaan masyarakat lantaran ia adalah adik kandung Gubernur NTB yang tengah menjabat. Ia juga memiliki pengalaman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan disokong banyak institusi sosial lainnya. *Ketiga*, dalam modal ekonomi, pasangan ini merupakan pasangan dengan modal ekonomi paling kecil. Penggunaan modal ekonomi hanya dipergunakan untuk membiayai akomodasi pemilu saja. Dengan menggunakan modal-modal tersebut, sebagai kandidat perempuan, Dewi Noviany memiliki kesempatan yang besar di dalam pemilihan umum. Modal yang paling dominan adalah modal politik, meskipun sebagian besar menyebutkan bahwa pemilu ditentukan oleh modal ekonomi. Dengan menggunakan strategi yang benar dan tim pemenangan yang solid, maka kekurangan pada modal ekonomi dapat diatasi.

Kata Kunci: Modal Politik; Dewi Noviany; Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2020; Perempuan dalam Politik

Abstract

This study aims to identify the capital owned by female candidates in the election of Kabupaten Sumbawa in 2020. The presence of Dewi Noviany as one of the candidate pairs in the election, provides an example of how the capital owned by the candidates can support her electability. This research is descriptive qualitative research. The methods of collecting data in this research is through a process of observation, document analysis, photos and conducting in-depth interviews with resource persons who have expertise in these fields. The result of this research indicates that Dewi Noviany have several capitals. First, in political capital, she is supported by political party that work optimally. Then she is supported by local elites and have family relationships with regional leaders who are currently serving. Meanwhile, she is also supported by a winning team that has experiences in the election before. Secondly, in terms of social capital, she won the public's trust because she is the younger sister of the current Governor of NTB. She also has experiences as a State Civil Apparatus (ASN) and supported by many social institutions. Thirdly, in economic capital, this candidate was the smallest economic capital. The use of economic capital is only used to finance election accommodations. By using these capitals, as a female candidate, Dewi Noviany has a great opportunity to won those election. The most dominant capital is political capital, although most said that elections are

determined by economic capital. By using the right strategy and a solid winning team, the shortage of economic capital can be overcome.

Keywords: Political Capital, Dewi Noviany, 2020 Sumbawa Regency Election, Women in Politics.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan ajang paling massif, bebas (*free*) dan adil untuk menentukan partai atau tokoh yang berhak mewakili rakyat. Dalam pemilu setiap orang dihargai sama, dengan demikian siapapun yang terpilih paling banyak, dianggap memiliki sumber dukungan yang juga lebih banyak dibandingkan yang lainnya (Pramono Anung, 2013). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum di Indonesia tidak hanya terselenggara pada tingkat pusat, melainkan juga dilaksanakan pada tingkat daerah. Dalam proses ini, keikutsertaan perempuan di dalam pemilu, baik pada pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah menjadi diskursus tersendiri yang mewarnai dinamika politik, khususnya pada tingkat lokal.

Dalam sistem kepemiluan, Indonesia telah menerapkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen baik pusat maupun daerah. Kepemimpinan perempuan di ruang publik sejauh ini masih menjadi perjuangan panjang bagi terwujudnya kesetaraan gender. Beberapa hal yang menjadi faktor fenomena tersebut telah dijabarkan juga oleh Asmaeny (2013) yakni pengaruh dari masih kuatnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang membatasi atau menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengulas terkait keikutsertaan perempuan di dalam politik. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Laura Hardjaloka (2012) dengan judul “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi”. Di dalam penelitian ini, Laura Hardjaloka menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Dengan memperhatikan hak tersebut, maka diskriminasi terhadap peran perempuan akan direduksi di tengah dominasi laki-laki. Potret semacam ini yang sejatinya harus terus digaungkan sebagai upaya untuk memberikann ruang yang bebas dan luas bagi keikutsertaan perempuan di dalam pemilu.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Susanti (2015) dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan”. Di dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perempuan dalam berpartisipasi

di dalam politik yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor keluarga yang masuk dalam faktor internal menjadi salah satu alasan terkuat dimana para anggota keluarga saudara dan sebagainya mampu mempengaruhi satu sama lain untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Sedangkan, faktor eksternal yaitu adanya tawaran dari masyarakat sekitar untuk memajukan si perempuan tersebut untuk maju berpartisipasi dan aktif di dalam politik. Adanya dorongan yang kuat tersebut memberikan ruang kontribusi bagi perempuan untuk tidak selalu menutup diri di dalam politik. Dorongan semacam ini yang seharusnya di pupuk sebagai upaya menghadirkan keikutsertaan perempuan di dalam politik tersebut.

Selain itu, penelitian lainnya dilakukan oleh Rika Novitasari dan Dessy Harsanti (2019) dengan judul “Strategi Calon Kepala Daerah Perempuan dalam Kontestasi Politik di Kota Batu Tahun 2017”. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran perempuan dalam urusan politik sangat perlu di tingkatkan. Peningkatan tersebut seiring dengan berkembangnya demokratisasi dan perkembangan global dengan gerakan emansipasi dan feminisme yang terjadi hampir di kebanyakan negara. Dewanti Rumpoko sebagai calon Kepala Daerah perempuan dalam pilkada Kota Batu cukup aktif menggaet dukungan dari kaum perempuan untuk memilihnya dalam kontestasi politik ini. Upayanya membuahkan hasil dengan terpilihnya dia sebagai Walikota Batu terpilih periode 2017-2022. Beberapa upaya seperti blusukan atau hadir bertatap muka dengan warga, penentuan program kerja strategis berbasis pengarusutamaan gender, dan pencitraan sebagai perempuan yang tangguh, mandiri, dan independen menjadi cara jitu yang dilakukan oleh Dewanti Rumpoko.

Kehadiran perempuan di dalam politik memberikan diskursus tersendiri di dalam politik. Kerap kali, kehadiran perempuan disandingkan dengan kemampuannya dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam pemilu eksekutif maupun dalam pemilu legislatif. Menurut Partini (2014) dalam Mouliza K.D. Sweinstani (2018), berdasarkan pada data IPU pada 1 Januari 2018, rata-rata jumlah keterwakilan perempuan di parlemen di dunia adalah sebesar 23.4%. Angka tersebut tentunya masing berada di bawah standar minimal *critical mass* yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia dalam Beijing Platform for Action, yaitu minimal 30%. Masih rendahnya kehadiran perempuan dalam parlemen di berbagai negara antara lain disebabkan oleh adanya stereotipe yang menyatakan bahwa politik bukanlah dunia perempuan. Pandangan tersebut praktis telah meringgirkan peran perempuan dalam bidang ini. Lebih lanjut, anggapan bahwa politik dan perilaku politik adalah aktivitas yang bersifat maskulin, semakin

mengeksklusikan perempuan dalam dunia ini karena maskulinitas tidak pernah dianggap sebagai bagian dari karakteristik ideal seorang perempuan.

Di Kabupaten Sumbawa, keterlibatan perempuan tidak serta merta muncul dengan tiba-tiba. Berdasarkan sejarah yang terjadi pada Pemilu tahun 2010 ada keterwakilan perempuan bernama Dharmawati Madilaoe yang mana merupakan putri mantan Bupati Sumbawa H. Madilaoe ADT. Kemudian dalam level Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018 ada Siti Rohmi Djalillah sebagai Wakil Gubernur terpilih yang merupakan kakak dari mantan Gubernur pada periode sebelumnya, yaitu M. Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB). Begitupun yang terjadi pada Dewi Noviany merupakan adik dari Gubernur NTB, Dr. Zulkifliemansyah (masa jabatan 2018-sekarang). Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan kekerabatan sebagai bentuk dari *patrimonial (partonase)* politik antara si perempuan dengan elit-elit lokal terjadi di Pemilu pada tingkat Kabupaten dan Pilgub di tingkat Provinsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai klasifikasi modal-modal yang dimiliki oleh kandidat perempuan dalam pemilu Kabupaten Sumbawa tahun 2020, yang melibatkan nama Dewi Noviany sebagai satu-satunya kandidat perempuan dan berhasil memenangkan pemilu. Penelitian ini akan mengulas modal politik yang dimiliki Dewi Noviany sebagai kandidat perempuan dalam pemilu tersebut. Setiap kandidat di dalam pemilihan umum, memerlukan modal politik untuk turut serta di dalam pemilihan umum. Modal politik tersebut dapat berupa dukungan dari partai politik, dukungan dari masyarakat, elit lokal maupun tim pemenangan yang solid. Selain modal politik, adanya modal sosial dan modal ekonomi yang turut serta menunjang modal-modal yang dimiliki oleh kandidat politik. Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya.

Pierre Bourdieu (1986) dalam karyanya yang berjudul *The Forms of Capital*, sebagaimana dikutip oleh Joni Firmansyah (2018) membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu, modal dapat muncul

dalam tiga samaran mendasar: (1) sebagai modal ekonomi, yang segera dan secara langsung dapat dikonversi menjadi uang dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan; (2) sebagai modal budaya, yang dapat dikonversi, dalam kondisi tertentu, menjadi modal ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan; dan (3) sebagai modal sosial, yang terdiri dari kewajiban sosial (koneksi), yang dapat dikonversi, dalam kondisi tertentu, menjadi modal ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar bangsawan.

Kimberly Casey (2006) dalam Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan atau memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu betapa pun adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi. Pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu. Sementara itu modal simbolik dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

Selain adanya dukungan dari lembaga politik untuk mendapatkan suatu modal politik, segenap individu juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan elit-elit tertentu, dalam konteks lokal dapat disebutkan sebagai elit lokal. Nurhasim (2003) dalam Joni Firmansyah (2018) menyebutkan bahwa elit politik lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Dewi Noviany

merupakan adik kandung dari Gubernur NTB aktif atau sedang menjabat. Hal ini tentunya memberikan potensi dan nilai tambah baginya untuk lebih unggul di dalam pemilu.

Selanjutnya, modal lainnya yang akan diulas adalah modal sosial. Elinor Ostrom dan T. K. Ahn dalam Svendsen (2009) menyebutkan bahwa modal dalam pengertian dasarnya adalah seperangkat aset yang mampu menghasilkan keuntungan di masa depan, setidaknya secara individual. Mereka mendefinisikan modal sosial adalah atribut individu dan berhubungan satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah kolektif. Terdapat tiga jenis modal sosial yang sangat penting dalam studi tindakan kolektif: (1) kepercayaan, (2) jaringan dan (3) peraturan formal dan informal atau institusi.

Lebih lanjut, modal lainnya yang akan diulas di dalam penelitian ini adalah modal ekonomi. Menurut Sahdan dan Habodin (2009) dalam Joni Firmansyah (2018), setiap penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilu kepala daerah (pilkada) maupun pemilu legislatif (pileg) membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan, yaitu (1) dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah. (2) Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada penggunaan dana politik dilakukan oleh calon pasangan tidak hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Tetapi juga mengenai pengeluaran pasangan calon untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan modal-modal yang dimiliki oleh Dewi Noviany untuk memenangkan pemilu. Penelitian ini juga berupaya untuk menambah khazanah pengetahuan terkait modal politik yang hingga saat ini pembahasannya masih perlu untuk dipertajam. Adanya pengaruh elit lokal, dukungan modal sosial dan kepemilikan modal ekonomi memberikan keuntungan tersendiri baginya untuk memenangkan pemilu.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif yang relevan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini ialah tipe studi kasus (*case study*). Tipe penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas (Moleong, 2012). Adapun yang menjadi alasan peneliti penggunaan tipe studi kasus adalah sebagai berikut: 1) Penelitian ini terfokus pada satu kasus atau kejadian dan dalam kurun waktu tertentu, yaitu pada Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. 2) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa penjelasan yang tepat berkaitan dengan aktivitas, proses-proses, atau pola-pola dari individu maupun kelompok berkaitan dengan bagaimana Dewi Noviany menggunakan modal politiknya untuk memenangkan pemilukada Kabupaten Sumbawa tahun 2020.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap informan penelitian. Sedangkan, data sekunder berasal dari dokumen-dokumen seperti dokumen-dokumen milik partai politik, dapat berupa dokumen terpublikasi maupun tidak terpublikasi, misalnya peraturan partai politik, AD/ART partai politik, literatur buku, jurnal dan hasil penelitian yang terkait.

Metode pengumpulan data berasal dari studi literatur dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Dari data tersebut, kemudian dianalisis untuk dijadikan data-data primer penelitian. Dengan demikian, dengan argumen rasional dari para informan penelitian serta dukungan data sekunder yang diperoleh, diharapkan penelitian ini mampu menjawab seluruh pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Modal-Modal Dewi Noviany dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2020

Keterlibatan perempuan di dalam pemilu, seringkali dinilai memiliki usaha (*effort*) yang berbeda daripada laki-laki. Pandangan ini memperkuat dominasi patriarki yang menghadirkan stereotipe bahwa dunia politik adalah milik kaum laki-laki. Argumen ini kemudian diuji di dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa tahun 2020, yakni kemenangan kandidat perempuan di dalam pemilu tersebut. Meskipun hadir sebagai wakil bupati, Dewi Noviany mampu membersamai H. Mahmud Abdullah untuk memenangkan pemilu tersebut.

Kemenangan ini dapat dianalisis sebagai upaya pemanfaatan modal-modal yang dimiliki oleh pasangan calon tersebut.

Tabel 1. Perolehan Suara Kandidat Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2020

No	Nama Kandidat	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1	M. Husni Djibril – Muhammad Ikhsan	PDIP, PKB, PAN	43.938
2	Nurdin Ranggabarani – Baharuddin Jafar Salam	PPP dan Partai Demokrat	41.275
3	Talifuddin – Sudirman	Independen	51.169
4	Mahmud Abdullah – Dewi Noviany	Partai Nasdem, PKS, Partai Golkar dan PBB	69.683
5	Syarafuddin Jarot – Mokhlis	Gerindra, Hanura, Berkarya, dan PKPI.	68.801

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sumbawa, 2020

Dari tabel diatas, dapat terlihat adanya selisih 882 suara antara pasangan H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, yang lebih unggul dari pasangan Syarafuddin Jarot dan Mokhlis. Selisih suara tersebut akan diulas lebih jauh dalam pembahasan berikutnya. Dalam subbab ini, akan dijelaskan klasifikasi modal-modal yang dimiliki oleh Dewi Noviany yang dinilai sebagai *support system* dari kemenangan pasangan calon tersebut.

Modal Politik

Modal politik dapat dikatakan sebagai salah satu bekal kandidat untuk dapat memenangkan suatu kontestasi politik. Seorang kandidat yang memiliki modal politik lebih besar dibandingkan kandidat lain, tentu mempunyai peluang yang lebih besar juga untuk dapat memenangkan kontestasi politik. Modal politik dapat diartikan bagaimana kandidat mendapatkan pengaruh atau dukungan yang diberikan oleh lembaga politik. Modal politik pertama yang dimiliki oleh Dewi Noviany adalah dukungan dari partai politik. Dalam hal ini kekuatan atau dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik (koalisi partai) terhadap kemenangan kandidat tersebut. Pasangan H. Mahmud Abdulah dan Dewi Noviany memiliki tiga partai politik yang mengusungnya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Golongan Karya (Golkar), serta Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai pendukung.

Kehadiran partai politik semakin memperkuat posisi dan daya tawar dari pasangan tersebut. Dukungan terhadap Dewi Noviany tidak hanya berkuat pada jaringan kekeluargaan dan partai politik, melainkan kualitas dari pasangannya, yakni H. Mahmud Abdullah. Ia merupakan petahana (*incumbent*) pada periode sebelumnya tahun 2016-2020. Sebagai

petahana, pasangan ini memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan jaringan (*networking*) yang telah dibangun pada periode sebelumnya.

Kehadiran partai politik yang kemudian menjadi modal politik bagi Dewi Noviany, tentunya bukan tanpa alasan. Partai politik menyebutkan bahwa memilih perempuan sebagai kandidat mereka di dalam pemilukada tentu menjadi tantangan tersendiri, namun faktor-faktor tersebut dapat diminimalisasi oleh faktor lainnya yang ternyata cukup dominan dan memiliki daya dorong yang kuat di dalam kontestasi.

“Memilih Dewi Noviany sebagai kader yang diusung di dalam pemilihan umum, tentunya bukan tanpa alasan. Kami melakukan survei dan kajian, terkait karakteristik pemimpin yang dibutuhkan oleh Sumbawa. Sehingga menyandingkan laki-laki dan perempuan sebagai paket pemilukada adalah langkah yang pas. Karena saat pemilukada Provinsi NTB, kandidat yang memenangkan pemilu adalah kombinasi antara laki-laki dan perempuan.” (Wawancara bersama Sambirang Ahmadi, Ketua Tim Pemenangan, 28 April 2021)

Kehadiran perempuan di dalam pemilukada di Kabupaten Sumbawa, memang menuai banyak tantangan. Namun, tantangan-tantangan tersebut dapat diminimalisasi dengan menghadirkan peluang-peluang lainnya. Kehadiran Dewi Noviany merupakan “turunan” dari paket kemenangan dalam pemilihan gubernur NTB di tahun 2018, dimana paket yang diusulkan adalah pasangan Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah. Pasangan ini kemudian dapat memenangkan pemilu, padahal saat itu Siti Rohmi Djalilah adalah satu-satunya figur perempuan di dalam kontestasi tersebut. Alasan lainnya, Zulkieflimansyah merupakan kakak kandung dari Dewi Noviany. Sehingga, inilah yang dimaksud dengan “turunan” tadi, yaitu upaya untuk memenangkan pemilu dengan menyandingkan dua gender karena telah ada contoh yang berhasil dalam pemilu sebelumnya.

Modal politik berikutnya yang dimiliki Dewi Noviany adalah dukungan elit-elit lokal. Selain dukungan dari partai politik, calon kandidat juga memerlukan dukungan dari elit-elit lokal. Dengan adanya dukungan dari elit-elit lokal yang memiliki dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam politik, dinilai lebih memiliki pengaruh yang besar untuk menunjang keterpilihan kandidat tersebut. Dewi Noviany sebagai kandidat perempuan memiliki modal politik yang cukup kuat. Dilihat dari latar belakang keluarganya, ia merupakan adik dari Gubernur NTB (Dr. H. Zulkieflimansyah). Hal ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan sebagai bentuk dari hubungan patrimonial (*patronase*).

Dalam sistem demokrasi, keikutsertaan sanak keluarga dalam kontestasi politik menuai banyak kontroversi. Dewi Noviany merespon hal tersebut bahwa tuding keluarga tengah membangun dinasti politik pada Pemilu Kabupaten Sumbawa tidaklah benar. Dalam asas demokrasi semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih apapun latar belakang sosialnya. Selama melalui kompetisi yang adil dan mengikuti tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu. Dewi Noviany menyebutkan bahwa dirinya tampil karena dorongan nurani, melihat posisi perempuan di Sumbawa selama ini menjadi masyarakat kelas dua.

“Saya ingin mengiktiarkan keterwakilan perempuan, mengingat belum pernah ada pemimpin perempuan di Sumbawa. Selama ini perempuan cuma di kasur, sumur dan dapur. Meskipun selama ini modal yang saya miliki hanya pengalaman saya yang basic awalnya adalah guru, kemudian 16 tahun mengikuti suami dan menjadi tim PKK di Kecamatan, dengan niat baik tersebut saya akan tetap maju meskipun harus mengorbankan karir ASN saya” (Wawancara bersama Dewi Noviany, 22 April 2021).

Selain karena adanya dukungan dari elit-elit lokal, Dewi Noviany juga ditunjang oleh mesin politik yang memadai. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel 1 diatas, pasangan H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany diusung oleh tiga partai, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Selain itu, ia juga didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang turut serta membantu kemenangannya. Dukungan dari partai politik tersebut merupakan bentuk modal politik, karena dari mesin politik inilah tim pemenangan pemilu terbentuk. Tim pemenangan ini menjadi motor penggerak, sebagaimana di dalam pemilu-pemilu lainnya, setiap kandidat pasti memiliki tim pemenangan.

Di dalam struktur tim pemenangan pasangan H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany tersebut, selain dari partai politik, tim pemenangan lebih banyak diisi oleh jaringan kekerabatan dan kekeluargaan. Jaringan ini terus dirawat dan tetap memiliki andil dalam setiap pemilihan umum sebelumnya, yakni pemilu Kabupaten NTB 2018, pemilu legislatif 2019 dan pemilu Kabupaten Sumbawa 2020. Sehingga setiap tahun, jaringan tim pemenangan ini tetap memiliki ruang untuk memperoleh dukungan masyarakat.

“Dewi Noviany, selain unggul karena faktor lainnya, beliau unggul dari sisi tim pemenangan. Hampi setiap tahun, “mesin politik” ini bekerja sejak pemilu Kabupaten NTB 2018, pemilu legislatif 2019 dan sekarang pemilu Kabupaten Sumbawa 2020. Sehingga Ibu Novi memperoleh keuntungan dari adanya

jaringan dan tim pemenangan ini” (Wawancara bersama Didi Mahendra Kusuma, Ketua Tim Media, 24 April 2022)

Modal Sosial

Modal sosial dapat berupa sumber daya yang digunakan untuk memperkuat interaksi sosial antar lapisan masyarakat. Modal sosial berupa hubungan sosial baik itu dengan teman, kolega, atau orang tertentu yang memiliki pengaruh untuk keterpilihan kandidat perempuan. Selain itu modal sosial juga dapat diartikan sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, memobilisasi ide, rasa saling percaya dan saling menguntungkan, sehingga tercapai tujuan dan dapat mencapai kemajuan bersama.

Modal sosial yang dimiliki Dewi Noviany sebagai kandidat perempuan dalam Pemilu Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dapat dianalisis ke dalam 3 hal utama. *Pertama*, kepercayaan. Dalam membangun *trust*, atau kepercayaan tersebut, masyarakat kerap mengaitkan sosok Dewi Noviany terhadap sosok kakaknya, Dr. Zulkieflimansyah yang sedang menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Keterikatan tersebut menjadikan Dewi Noviany sebagai figur yang memiliki modal besar dalam pemilu, karena ada sosok orang kuat dibelakangnya. Bahkan, dalam beberapa kampanye nya, ia kerap menyatakan bahwa akan muncul sinergisitas antara program di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Meskipun secara tersirat, namun dari hal tersebut publik sudah bisa menangkap arah penyampaian tersebut.

“Kami melihat sosok Ibu Novi yang memiliki koneksi langsung dengan Pak Gub (Gubernur NTB), sehingga kinerja beliau pastinya akan berjalan beriringan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Gub selama ini” (Wawancara bersama Yadi, relawan Mo-Noviy, 24 April 2021)

Kedua, jaringan. Selain *trust*, jaringan juga berperan penting sebagai modal sosial Dewi Noviany dalam pemilihan umum. Seiring dengan *trust* tersebut, jaringan Dewi Noviany juga di *support* dari mesin politik partai dan elit-elit lokal dibelakangnya. Dewi Noviany sebagai kandidat perempuan membangun modal sosialnya dimulai dengan membangun komunikasi kembali dengan teman, kolega, maupun murid yang pernah diajarnya. Sebelumnya ia adalah seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Sumbawa. Dewi Noviany memanfaatkan komunikasi dengan beberapa guru dan murid tersebut untuk mendongkrak keterpilihannya. Sehingga menurut Dewi Noviany pada saat melakukan sosialisasi (kampanye) masih banyak yang mengenalnya karena pernah diajar maupun bekerja dengannya. Dewi Noviany memiliki jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

kemudian memilih mengundurkan diri sesuai syarat-syarat pencalonan Pemilukada. Selain itu, ia memiliki pengalaman 16 tahun mendampingi suaminya yang menjabat sebagai camat di beberapa kecamatan, serta menjadi ketua tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan.

“Basic awal saya menjadi guru dari tahun 1999, kemudian pernah menjadi tim penggerak PKK di lima Kecamatan yaitu di Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir, Labangka, Plampang, dan Empang. Jadi ketika ibu pergi sosialisasi, pembinaan, dan lain-lain. Sedikit banyak yang sudah kenal ibu karena pernah berinteraksi” (Wawancara bersama Dewi Noviany, 22 April 2021).

Maka dari itu dengan adanya interaksi sosial, juga lama aktif di organisasi sosial (PKK) menjadikan Dewi Noviany memiliki tingkat popularitas dan banyak dikenal oleh masyarakat. Sehingga dengan interaksi sosial tersebut menimbulkan adanya kepercayaan dari masyarakat. Dimana hubungan itu memberikan kesempatan kepada calon kandidat perempuan Dewi Noviany untuk menggunakan atau mengubah modal finansial dan modal personal menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan.

Ketiga, institusi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, selain kepercayaan dan jaringan, institusi juga memberikan sumbangsih dalam meningkatkan modal ekonomi Dewi Noviany. Penggunaan istilah institusi, merujuk kepada posisi Dewi Noviany sebagai seorang ASN dan posisinya sebagai *co-founder* dari Yayasan Dea Mas, yang memiliki lembaga pendidikan sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Sumbawa. Kepemilikan posisi dan status tersebut memberikan daya tawar modal sosial yang kuat bagi Dewi Noviany. Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin banyak interaksi sosial dengan masyarakat, maka semakin mudah dalam menambah relasi untuk memperkuat modal sosial. Kekuatan modal sosial adalah status sosial itu sendiri yang memberikan gambaran terhadap figur penyandang status sosial tersebut. Semakin banyak ia berinteraksi, aktif dan inisiatif serta memberi kebermanfaatan, maka hal-hal tersebut akan menunjang modal sosial.

Modal Ekonomi

Modal ekonomi lebih ditekankan pada modal finansial berupa uang dan modal material lainnya. Sama seperti para politisi lainnya, Dewi Noviany sebelum mendaftarkan diri menjadi calon wakil bupati, juga mempertimbangkan kemampuan finansial yang dimilikinya.

“Istilahnya menjadi calon pemimpin harus ada yang dikorbankan, mana ada cerita mau jadi pemimpin tidak ada pengorbanan. Modalnya saya punya aset, mau ikut Pilkada saya jual aja. Jadi ibu modalnya juga pake duit misalnya ada tamu tim sosialisasi masa *nda* di kasih minum, masa air putih aja” (Wawancara bersama Dewi Noviany, 22 April 2021).

Hal yang senada dikatakan juga oleh Ketua Tim Relawan pasangan H. Mahmud Abdullah-Dewi Noviany yang menyebutkan bahwa:

“Karena materi itu menyesuaikan. Kami menganggap bahwa seseorang yg mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah sesungguhnya sudah siap dengan segala macam konsekuensinya, termasuk bagaimana biaya pemilu, bagaimana material pemilu, biaya operasional, dan biaya alat lainnya” (Wawancara bersama Chandra Wijaya Rayes, Ketua Tim Relawan, 8 Juni 2021).

Dalam menganalisis modal ekonomi, kita dapat mempertimbangkan argumentasi yang dikemukakan oleh Sahdan dan Habodin, yaitu berasal dari sumber pendanaannya dan penggunaan dana tersebut. Dibandingkan dengan kandidat lainnya, Dewi Noviany bukanlah kandidat terkaya secara materi, masih ada kandidat lainnya yang melebihinya. Berdasarkan laporan harta kekayaan pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, pasangan H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany merupakan pasangan calon dengan total kekayaan yang paling sedikit.

Tabel 2. Total Kekayaan Pasangan Kandidat Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2020

No	Nama Kandidat	Total Kekayaan (Rp)
1	M. Husni Djibril Muhammad Ikhsan	10.831.453.845 9.869.329.331
2	Nurdin Ranggabarani Baharuddin Jafar Salam	12.784.976.524 9.293.426.707
3	Talifuddin Sudirman	982.554.653 11.943.288.313
4	Mahmud Abdullah Dewi Noviany	1.761.279.753 1.852.935.970
5	Syarafuddin Jarot Mokhlis	28.455.900.000 7.960.500.000

Sumber: KPUD Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pasangan H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany merupakan pasangan calon dengan total kekayaan yang paling rendah,

dibandingkan pasangan calon lainnya. Sehingga berdasarkan sumber dana atau anggaran, tentunya pasangan ini tidak diunggulkan dan tidak didukung oleh modal ekonomi yang kuat dan mandiri. Hanya saja, faktor-faktor yang menjadi kelemahan tersebut, dapat diimbangi oleh faktor lainnya, misalnya modal politik dan kekuatan modal sosial.

“Jika pemilu diukur dari siapa yang paling kaya, maka pasangan Mo-Novti bukanlah pemenang pemilu, karena tentunya ada pasangan calon lainnya yang lebih kaya. Di dalam pemilu, materi memang berperan, namun bukanlah yang paling dominan. Kekuatan tim dan figur, adalah faktor yang paling dominan” (Wawancara bersama Ardiansyah, Dosen Universitas Samawa, 12 Juni 2021)

Penggunaan modal ekonomi, sejatinya dapat terlihat dari bagaimana sikap kandidat politik tersebut. Setiap kandidat politik, pasti melakukan safari politik, mempersiapkan alat peraga pemilu, akomodasi tim pemenangan, biaya saksi dan mobilitas-mobilitas lainnya. Namun, yang kerap terlewat adalah *cost* politik untuk mobilisasi partai politik dan mobilisasi suara pemilih pada saat hari pemilihan umum. Dalam kasus Dewi Noviany, sebagai kandidat perempuan yang disandingkan dengan politisi senior H. Mahmud Abdullah, modal ekonomi mereka dinilai tidak mampu memobilisasi keseluruhan hal tersebut. Partai politik juga mengakui bahwa terkait upaya membayar partai, tidak dilakukan oleh pasangan tersebut. Namun jika ada biaya yang dikeluarkan untuk partai, hal tersebut tidak lain sebagai biaya akomodasi tim pemenangan yang berasal dari partai politik.

“Di partai kami, tidak ada istilah mahar politik. Kami melakukan rekrutmen berdasarkan peraturan organisasi (PO) dari pucuk DPP partai. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon untuk partai, hal ini wajar karena biaya tersebut diperuntukkan bagi tim pemenangan di partai politik” (Wawancara bersama H. Asaat Abdullah, Ketua Partai Nasdem, 17 Juni 2021)

Berdasarkan keseluruhan uraian dan penjelasan diatas, penggunaan modal-modal yang dimiliki oleh Dewi Noviany sebagai kandidat perempuan dalam pemilukada Kabupaten Sumbawa tahun 2020, lebih banyak dipengaruhi oleh modal politik dan modal sosial. Dengan memaksimalkan kedua modal tersebut, kekurangan pada modal ekonomi menjadi hal yang dapat diminimalisir.

“Pasangan H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany diperkuat dengan jejaring politik yang dimiliki, baik kepemilikan secara personal (jejaring keluarga) maupun secara politik (partai politik). Dari dukungan jejaring tersebut, tentu pasangan ini memiliki peluang menang yang besar, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dewi Noviany adalah bagian dari salah satu

lembaga perguruan tinggi di Sumbawa, tentu modal sosialnya besar. Modal politik dan modal sosial yang besar, pasti akan menunjang modal ekonomi juga” (Wawancara bersama Chandra Wijaya Rayes, Ketua Tim Relawan, 8 Juni 2021)

KESIMPULAN

Keikutsertaan perempuan di dalam pemilu kerap kali menjadi diskursus tersendiri di dalam membahas fenomena politik. Beberapa tantangan yang kerap kali muncul selalu berkaitan dengan isu-isu gender dan kepemilikan modal bagi perempuan tersebut. Hadirnya Dewi Noviany di dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa tahun 2020 merupakan salah satu contoh bagaimana perempuan dapat menjadi bagian dari kemenangan pemilu dikarenakan kepemilikan modal-modal yang dapat menunjang keterpilihannya, meliputi modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Pembahasan mengenai modal-modal politik di dalam ilmu sosial memang masih membutuhkan penajaman, terlebih lagi publikasi terkait pembahasan ini masihlah tergolong minim. Sehingga pembahasan mengenai kasus Dewi Noviany, diharapkan mampu menambah khazanah pembahasan terkait modal-modal tersebut.

Keikutsertaan Dewi Noviany dalam pemilukada Kabupaten Sumbawa, lebih banyak dipengaruhi oleh modal politik yang meliputi dukungan partai politik, dukungan elit lokal dan kekuatan tim kemenangan sebagai mesin politik. Dukungan partai politik ditandai dengan banyaknya partai yang mengusung dirinya dengan mempertimbangkan “turunan” paket pasangan calon yang mengkombinasikan gender antara laki-laki dan perempuan setelah berkaca pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018. Selain itu, dukungan elit lokal menjadi kekuatan yang paling dominan, mengingat adanya hubungan kekeluargaan antara dirinya dengan elit-elit lokal tersebut. Adapun tim kemenangan yang menggawangi pasangan Mo-Novi tersebut, merupakan tim kemenangan yang dirawat sepanjang pemilu yang terselenggara, baik pada level provinsi maupun pada level kabupaten.

Selain modal politik, modal sosial turut serta mewarnai keterpilihan tersebut. Kepercayaan atau *trust* dari masyarakat terhadap dirinya, lahir dari pengalaman pemilu sebelumnya yang memenangkan Zulkieflimansyah – Siti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Mengingat Dewi Noviany merupakan adik kandung gubernur terpilih, maka semakin memperkuat *trust* publik. Sementara dalam modal ekonomi, pasangan ini tidak diunggulkan mengingat beberapa kandidat lainnya lebih unggul dari dirinya.

Namun, dengan memaksimalkan modal yang lain, Dewi Noviany dapat meminimalisir kekurangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

- Aesmany, Azis. (2013). *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Firmansyah, Joni (2018). *Keterpilihan Calon Anggota Legislatif Dari Kalangan Selebriti Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Studi Kasus Eko Hendro Purnomo, Krisna Mukti, dan Gitalis Dwi Natarina*. Tesis. Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hardjaloka, Loura (2012). *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*. Jurnal Konstitusi, 9 (2): 404-430.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Novitasari, Rika & Tikka Dessy Harsanti. (2019). *Strategi Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Kontestasi Politik di Kota Batu Tahun 2017*. WASKITA. 3 (1).
- Pramono Anung Wibowo, (2013). *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi, Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Susanti, (2015). *Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 3 (1): 1-13.
- Svendsen, T. & Gunnar Svendsen (ed) (2009). *Handbook of Social Capital, The Troika of Sociology, Political Science and Economics*. Northampton: Edward Edgard Publishing
- Sweinstani, Mouliza K.D. (2018). *Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Sebuah Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi*. Jurnal Penelitian POLITIK. Vol. 15 (2): 307-317.
- Sudirman Nasir, (2009). *SBY: Antara Modal Politik dan Modal Simbolik*. Diunduh di <http://news.liputan6.com/read/251345/sby-antara-modal-politik-dan-modal-simbolik>. Diakses pada hari Jumat, 25 Februari 2022
- Wawancara bersama Dewi Noviany, Kandidat Terpilih, 22 April 2021
- Wawancara bersama Didi Mahendra Kusuma, Ketua Tim Media, 24 April 2022
- Wawancara bersama Yadi, relawan Mo-Novi, 24 April 2021
- Wawancara bersama Sambirang Ahmadi, Ketua Tim Pemenangan, 28 April 2021
- Wawancara bersama Chandra Wijaya Rayes, Ketua Tim Relawan, 8 Juni 2021
- Wawancara bersama Ardiansyah, Dosen Universitas Samawa, 12 Juni 2021
- Wawancara bersama H. Asaat Abdullah, Ketua Partai Nasdem, 17 Juni 2021